BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telh diuraikan di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol, dilihat dari: *Planning, Organizing, Actuating,* dan *Controlling* telah dilaksanakan, akan tetapi pada pegorganisasian dan pelaksanaan (Actuating) dinilai belum optimal, karena struktur organisasi teknis tidak dibentuk sehingga masih terdapat tumpang tindih tugas dan wewenang serta masih mengalami kesalahan dalam memasukkan pos jenis belanja, sehingga menimbulkan ketidaksesuian data OPD dengan data yang ada dalam system SIMDA.
2. Determinasi Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) di BPKAD Kabupaten Buol yang dilihat dari: a. Relevan, b. Keandalan, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami telah dilaksanakan dan menjadi indikator kebrhasilan penerapan SIMDA di BPKAD Kabupaten Buol, meskipun pada point ke 4 yakni dapat dipahami masih belum optimal karena masih banya OPD yang belum paham istilah akuntansi disebabkan oleh background Pendidikan bukan berasal dari Akuntansi, serta pemahaman tentang PSAP masih kurang.

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian di atas, maka yang menjadi saran perbaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pada aspek pengorganisasian perlu dibentuk struktur organisasi Teknik yang menangani SIMDA, baik SIMDA Penganggaran, Keuangan, Gaji, dan lain-lain untuk menhindari adanya tumpeng tindih tugas dan wewenang
2. Pada aspek pelaksanaan (Actuating) perlunya peningkatan pelatihan Bimtek bagi para Bendahara dalam rangka meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai laporan keuangan Pemerintah Daerah dalam hal ini adalah SIMDA
3. Agar laporan keuangan dapat dipahami, maka perlunya peningkatan pemahaman dasar terkait dengan istilah akuntansi yang digunakan dalam PSAP sehingga dapat meminimalisir kesalahan, dan laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna laporan keuangan itu sendiri

DAFTAR PUSTAKA

Abdul *Halim* dan Muhammad Syam *Kusufi*. 2014. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.

Adisasmita, R. 2011, *Pengelolaan Pendapatan dan Anggaran Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu

Amin Widjaja Tunggal. 2014. *Pengetahuan Dasar Auditing*. Jakarta: Harvarindo.

Bogdan dan Taylor, 2010 J. *Metodologi Penelitian. Kualitatif.* Bandung: Remadja Karya

Dharma, K. *2015*. *Metodologi Penelitian Keperawatan*. Jakarta timur: CV. Trans Info Media

Davis, Gordon B. 2013. *Kerangka Dasar Sistem Informasi Manajemen*. Palembang: Maxikom

Drs. S. Munawir. 2010.*Analisa Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Liberty

Feriyanto, Andri dan Shyta, Endang Triana. 2015. *Pengantar Manajemen*. Kebumen: Mediatera.

Fattah, Nanang, 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, Cet. 9.

Fayol, Henry. 2010. *Manajemen Public Relations*. Jakarta: PT Elex Media

G.R. Terry. *2010*. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Edisi Pertama. Cetakan. Pertama. Jakarta: Penerbit Kencana.

Handoko, T. Hani. 2009. *Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.

Hartono, Bambang. *2013*. *Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer*. Jakarta: Rineka Cipta

Hasbullah. *2005*. *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT Raja. Grafindo Persada

Hasibuan, Malayu. *2013*. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.

Hardani, Dkk. 2020. Buku Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.

Kasmir. *2013*. *Analisis Laporan Keuangan*. Edisi 1. Cetakan ke-6, Jakarta: Rajawali Pers.

Mulyanto, Agus. 2009. *Sistem Informasi Konsep & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Romney, Marshall B. dan Steinbart, 2015. *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi 13, alihbahasa: Kikin

Rochaety, Eti *dkk*. 2013. *Sistem Informasi Manajemen*. Edisi 2. Jakarta: Mitra Wacana. Media.

Sakinah Nur Safira dan Novita Puspasari, Salemba Empat, Jakarta.

Sujarweni, Wiratna. *2014*. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru. Press.

Sugiyono. *2014*. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*. *Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarna. *2011*. *Dasar-dasar Manajemen*. Bandung: Mandar Maju.

Sutanta, Edhy. *2014*. *Sistem Basis Data*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Samsu, M.Pd. 2017. METODE PENELITIAN: (*Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif,Mixed Methods, serta Research & Development*). Cetakan I, Desember. Jambi: PUSAKA

Jurnal

Andini Kusuma Dewi. 2014. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi Simda (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kepuasan Pengguna Akhir. (Studi Kasus Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau).

Dian Tri Anggraeni dan Akhmad Ridwan, 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keterandalan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada SKPD di Kabupaten Sidoarjo). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi Vol.3 No.3*

Machmud, Rizan. 2013. Hubungan Sistem Informasi Manajemen dan Pelayanan dengan Kinerja Pegawai pada Rutan Makassar. *Jurnal Capacity STIE AMKOP Makassar.*

Peraturan

Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. 2020. *Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Tentang Penyajian Laporan Keuangan.* Jakarta

Permendagri No. 13 tahun 2006 mengenai Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah

Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan pemerintah No. 58 tahun 2005 mengenai Pengelolaan Keuangan Derah

Peraturan pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah

Peraturan pemerintah No. 105 tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang. Standar Akuntansi Pemerintahan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 *tentang. Pengelolaan Keuangan Daerah*,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan. Keuangan Daerah.*

Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 dan Peraturan Menteri

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Republik Indonesia. 2002. Kepmendagri No 29 tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Jakarta: Legalitas.